

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: Pancar Siwah, 2004).
- Adnani, Hariza, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Astawa, I Gde Panjta dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: P.T. Alumni, 2008).
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003).
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Irwan, Julianto. *Udara Bebas Asap Rokok Adalah HAM*. (Jakarta: Kompas, 2001).
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christin S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000).
- Kansil, C.S.T. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Nugroho, D. Riant. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006).

- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007).
- Pasolong, Harabani. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Pitoyo, Whimbo. *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*. (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Sastrawijaya, Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Cet. 2. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008).
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Aksara Baru, cet vi, 1987).
- Syah, Mudakir Iskandar. *Hukum dan Keadilan*. (Jakarta: Grafindo Utama, 1985).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Thomas, Dye R. *Understanding Public Policy*. (New Jersey: Pearson Education' Upper Saddle River, 2008).
- Toha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bayumedia, 2008).
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007).
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635063).*

_____. *Peraturan daerah Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.*

C. Kamus

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

D. Jurnal

Attamimi, A. Hamid. S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. (Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 1990).

Ratnawaty, Latifah dan Sri Hastuti. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor*, Jurnal Yustisi, Vol. 04 No. 02, September 2017.

Rengkung, Timothy Edwin. |Sanksi Pidana Akibat Dengan Sengaja Melanggar Kawasan Tanpa Rokok”. Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014.

Sri, Widiati, “Efektivitas Pesan Bahaya Rokok Pada Bungkus Rokok Terhadap Perilaku Merokok Masyarakat Miskin”. Jurnal; Promkes, Vol 1 Nomor 2 Desember 2013.

Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2, 2016).